

Eka Kusumaningtias<sup>1</sup>  
 Arifah Sitta Qotrunada<sup>2</sup>  
 Luthfi Shaalihah A.<sup>3</sup>

## KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENANGGULANGAN BENCANA: KAJIAN TENTANG HUBUNGAN DAN PELAKSANAANNYA

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan publik dalam penanggulangan bencana di Indonesia dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya. Bencana alam, yang kerap melanda Indonesia karena posisi geologisnya, memberikan dampak sosial, ekonomi, dan fisik yang besar bagi masyarakat. Kebijakan penanggulangan bencana melibatkan mitigasi, kesiapsiagaan, respons darurat, dan rehabilitasi. Namun, dalam praktiknya, kebijakan tersebut sering menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakefisienan antara pemerintah pusat dan daerah, terbatasnya sumber daya, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai isu kebencanaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan observasi terhadap pejabat pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat yang terdampak bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk memperbaiki koordinasi antar lembaga, perbedaan prosedur antar instansi dan birokrasi yang rumit tetap menjadi hambatan utama. Keterbatasan pendanaan juga memengaruhi efektivitas kebijakan, terutama dalam tahap mitigasi dan pemulihan setelah bencana. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang mitigasi bencana masih rendah meskipun ada upaya sosialisasi dari pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penanggulangan bencana, diperlukan perbaikan dalam koordinasi antar lembaga, alokasi anggaran yang lebih memadai, dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana.

**Kata Kunci:** Kebijakan Publik, Penanggulangan Bencana, Mitigasi, Kesiapsiagaan, Masyarakat.

### Abstract

This study aims to explore public policies in disaster management in Indonesia and evaluate the effectiveness of their implementation. Natural disasters, which frequently hit Indonesia due to its geological location, have significant social, economic, and physical impacts on society. Disaster management policies involve mitigation, preparedness, emergency response, and rehabilitation. However, in practice, these policies often face various obstacles, such as inefficiency between the central and regional governments, limited resources, and low public awareness of disaster issues. This study uses qualitative methods with interviews and observations of government officials, non-governmental organizations, and disaster-affected communities. The results show that despite efforts to improve coordination between agencies, differences in procedures between agencies and complicated bureaucracy remain major obstacles. Limited funding also affects the effectiveness of policies, especially in the mitigation and recovery stages after a disaster. In addition, public awareness of disaster mitigation is still low despite government socialization efforts. This study concludes that to increase the effectiveness of disaster management policies, improvements in inter-agency coordination, more adequate budget allocation, and increased public understanding of the importance of disaster preparedness are needed.

**Key words:** Public Policy, Disaster Management, Mitigation, Preparedness, Community.

<sup>1,2,3</sup> Politeknik Madyathika

email: [Ekakusuma631@gmail.com](mailto:Ekakusuma631@gmail.com) [arifahsittaqotrunada@gmail.com](mailto:arifahsittaqotrunada@gmail.com) [luthfiazzahroo7@gmail.com](mailto:luthfiazzahroo7@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Sugiyantoro dan Hadi Purnomo (2010) mendefinisikan bencana sebagai sebuah peristiwa yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Peristiwa ini bersifat merusak, membawa dampak yang merugikan, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih sepenuhnya. Artinya, bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik seperti hancurnya bangunan atau infrastruktur, tetapi juga berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari masyarakat yang terdampak. Proses pemulihan sering kali memerlukan upaya yang intensif dan berkelanjutan. Berdasarkan aspek geologi, sebagian besar wilayah Indonesia tergolong kawasan yang rawan bencana alam. Hal ini disebabkan oleh letaknya yang berada di pertemuan dua jalur pegunungan muda dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sirkum Pasifik adalah jalur pegunungan yang mengelilingi Samudra Pasifik dengan aktivitas vulkanik dan seismik yang tinggi, sedangkan Sirkum Mediterania merupakan rangkaian pegunungan yang membentang dari Pegunungan Atlas di Afrika Utara, melalui Eropa Selatan, hingga Asia Tenggara dan mencakup wilayah Indonesia (Warto, 2002:6).

Dampaknya, Indonesia memiliki kekayaan bentang alam yang beragam dan indah, meliputi jajaran pegunungan di sisi barat dan selatan pulau-pulau, lembah, tebing terjal, ngarai, serta kepulauan. Selain itu, posisi geologis ini juga membuat Indonesia kaya akan mineral dan bahan tambang yang melimpah. Namun, letak geologis tersebut juga meningkatkan risiko terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, serta tanah longsor. Seiring dengan tingginya frekuensi bencana alam yang terjadi, seharusnya Pemerintah Indonesia merumuskan berbagai kebijakan untuk mengurangi dampak bencana yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia (Fauziah, 2014). Kebijakan publik dalam menangani bencana memiliki peranan yang sangat penting untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan serta memperkuat ketahanan masyarakat (Ruchban et al., 2024). Kebijakan ini melibatkan berbagai langkah yang harus dilaksanakan, mulai dari tindakan pencegahan dan pengurangan risiko bencana (mitigasi) untuk mengurangi risiko bencana sebelum terjadi melalui pencegahan, edukasi, dan perencanaan tata ruang yang memperhatikan potensi bencana. Kesiapsiagaan berfokus pada persiapan dengan menyusun rencana darurat, memberikan pelatihan, dan menyebarkan informasi kepada masyarakat agar siap menghadapi bencana. Respons adalah tindakan darurat yang mencakup penyelamatan, distribusi bantuan, dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana. Setelah bencana, rehabilitasi dilakukan untuk memulihkan kondisi masyarakat dan infrastruktur, serta mengembalikan kehidupan sosial dan ekonomi ke keadaan normal atau lebih baik. (Rama & Qadriina, 2024). Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Pasal 6 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang meliputi beberapa aspek penting. Pertama, pemerintah bertanggung jawab untuk mengurangi risiko bencana dan mengintegrasikan pengurangan risiko ini dengan program pembangunan. Kedua, pemerintah harus melindungi masyarakat dari dampak bencana dan memastikan pemenuhan hak masyarakat serta pengungsi secara adil, sesuai dengan standar pelayanan minimum. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk memulihkan kondisi setelah bencana, mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam anggaran negara, serta menyediakan dana siap pakai untuk keperluan darurat. Terakhir, pemerintah harus memelihara arsip atau dokumen yang otentik dan kredibel terkait ancaman dan dampak bencana. Namun, dalam penerapan kebijakan tersebut, sering kali muncul berbagai kendala, termasuk kurangnya koordinasi antara lembaga terkait, terbatasnya sumber daya, serta rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai isu kebencanaan (Yusuf, 2015). Dalam pelaksanaannya, penanggulangan bencana menjadi tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Bentuk tanggung jawab tersebut antara lain adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana, yang merupakan salah satu bentuk perlindungan negara terhadap warganya (<https://sultra.bpk.go.id/>)

Ketidakefisienan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu penghalang utama dalam pelaksanaan kebijakan (Fariza & Handayani, 2022). Hal ini terjadi ketika terdapat perbedaan dalam koordinasi, pengelolaan, atau alokasi sumber daya antara kedua level pemerintahan, yang dapat menghambat efektivitas kebijakan yang diterapkan. Ketidakefisienan ini dapat menyebabkan kebijakan tidak berjalan dengan baik, tidak mencapai tujuan yang diinginkan, atau bahkan memperburuk situasi yang ada, karena masing-masing pihak tidak

bekerja secara sinergis atau ada tumpang tindih dalam pelaksanaan. Selain itu, tantangan pendanaan dalam penanggulangan bencana di Indonesia memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan memperbaiki mekanisme alokasi dan penganggaran serta mengembangkan sistem pembiayaan yang lebih fleksibel dan berkelanjutan, diharapkan respons terhadap bencana dapat ditingkatkan secara signifikan. Kolaborasi yang efektif antara berbagai pihak, seperti instansi pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat lokal, sangat penting untuk memastikan kebijakan dapat diterapkan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Tanpa koordinasi yang baik, setiap pihak mungkin tidak akan menjalankan peranannya dengan maksimal, yang dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam penanggulangan masalah, seperti bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkolaborasi dengan kementerian terkait untuk mengelola bencana dari tahap awal hingga pemulihan, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di wilayahnya. Selain itu, kebijakan harus mencakup pertimbangan terhadap ketersediaan dana yang memadai. Terbatasnya sumber daya sering kali menjadi kendala dalam penyediaan peralatan dan infrastruktur yang diperlukan untuk mitigasi serta pemulihan setelah bencana (Pezzica et al., 2021). Pendanaan yang memadai sangat penting untuk meningkatkan kapasitas tim respons darurat, memberikan pelatihan kepada tenaga penyelamat, serta mengembangkan program pelatihan bagi masyarakat agar setiap individu lebih siap menghadapi situasi bencana. Pendanaan yang cukup diperlukan untuk memperkuat kemampuan tim respons darurat, termasuk pelatihan bagi tenaga penyelamat dan program edukasi masyarakat (Wahana Visi, 2021). Kemudian, Meskipun pemerintah telah menganggarkan dana cadangan untuk penanggulangan bencana, jumlah tersebut sering kali tidak mencukupi untuk menangani kerugian yang ditimbulkan oleh bencana. Data menunjukkan bahwa kerugian ekonomi akibat bencana di Indonesia mencapai Rp22,8 triliun per tahun, sementara anggaran kontingen hanya sekitar Rp3,1 triliun (Kemenkeu, 2023). Dengan segala kendala yang ada, ketahanan masyarakat akan adanya bencana akan semakin kokoh dan mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara kebijakan publik dan efektivitas pelaksanaannya. Diharapkan temuan dari penelitian ini dapat memberikan saran yang berguna untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi kemungkinan bencana di masa depan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan public dalam menangani bencana alam yang terjadi di Indonesia. Peneliti memilih metode ini dikarena mampu memberikan pemahaman secara mendalam dari berbagai pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dalam penanganan bencana alam. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan obervasi dengan pejabat pemerintah, organisasi non-pemerintah dan masyarakat yang terkena bencana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Meskipun ada kesadaran dan upaya untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai sektor dan lembaga terkait dalam penanggulangan bencana, proses pelaksanaan kebijakan masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu kendala utama adalah adanya perbedaan prosedur antarinstansi, yang dapat menyebabkan kebingungannya alur pengambilan keputusan dan memperlambat respons yang cepat dalam situasi darurat. Selain itu, masalah birokrasi yang rumit juga memperburuk situasi ini, sehingga menghambat upaya untuk mengatasi bencana dengan efisien. Selain itu, keterbatasan dalam kapasitas teknis, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan peralatan yang memadai, juga menghalangi optimalisasi kesiapsiagaan bencana yang efektif. Hal ini menunjukkan pentingnya perbaikan dalam sistem koordinasi, penyederhanaan birokrasi, serta peningkatan kapasitas teknis untuk merespons bencana dengan lebih cepat dan efektif. Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah adanya keterbatasan signifikan dalam pendanaan untuk penanggulangan bencana, terutama pada tahap mitigasi serta pemulihan setelah terjadinya bencana. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari perwakilan pemerintah, alokasi anggaran yang tidak memadai dan keterbatasan dana di tingkat daerah menjadi faktor penghambat utama dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan kebencanaan. Hal ini berujung pada kurang optimalnya kesiapsiagaan masyarakat dan

infrastruktur penunjang kebencanaan, yang pada gilirannya mengurangi efektivitas kebijakan penanggulangan bencana secara keseluruhan. Tantangan utama yang dihadapi dalam partisipasi dan kesiapsiagaan masyarakat adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang mitigasi bencana dan kurangnya kesiapan mereka untuk menghadapi situasi darurat meskipun sudah ada upaya sosialisasi dari pemerintah. Selain itu, meskipun teknologi peringatan dini, seperti sistem alarm atau aplikasi yang dapat mendeteksi potensi bencana (seperti gempa bumi, tsunami, atau banjir), terbukti efektif dalam meningkatkan respons cepat terhadap bencana, namun penerapan teknologi ini masih sangat terbatas di daerah-daerah terpencil. Daerah-daerah ini seringkali menghadapi masalah serius dalam hal infrastruktur, seperti akses yang terbatas ke internet, perangkat keras yang kurang memadai, atau jaringan komunikasi yang tidak stabil.

Berdasarkan hasil yang telah dijelaskan di atas, Implementasi kebijakan publik dalam penanggulangan bencana di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan besar. Keberhasilan kebijakan penanggulangan bencana dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti koordinasi yang baik antar berbagai lembaga, baik pemerintah pusat, daerah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta, sangat diperlukan untuk memastikan respons yang cepat dan terorganisir dalam situasi darurat. Namun, hambatan seperti perbedaan prosedur dan birokrasi sering kali menghambat proses tersebut. Selain itu, keterbatasan dana menjadi masalah utama dalam pengalokasian anggaran untuk kegiatan mitigasi, penanganan bencana, dan pemulihan pascabencana, yang dapat memperlambat pengembangan infrastruktur yang diperlukan. Partisipasi aktif masyarakat juga sangat berperan dalam kesiapsiagaan bencana. Namun, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya mitigasi dan sering kali tidak siap menghadapi bencana, yang membuat mereka lebih rentan terhadap dampak bencana. Keterkaitan antara ketiga faktor ini sangat besar, karena jika salah satu faktor terhambat, keseluruhan upaya penanggulangan bencana akan terganggu.

Koordinasi yang efektif antarinstansi menjadi hambatan utama dalam menghadapi bencana yang memerlukan tindakan cepat dan terkoordinasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan kerjasama antara sektor-sektor yang berbeda, hambatan yang timbul akibat birokrasi dan perbedaan prosedur antar lembaga masih menghambat kelancaran pelaksanaan kebijakan. Masalah birokrasi yang rumit dan ketidaksesuaian prosedur antar lembaga menyebabkan pengambilan keputusan dalam situasi darurat menjadi lebih lambat. Hal ini akhirnya mengurangi efektivitas dalam memberikan respons terhadap bencana, karena keputusan yang diambil menjadi tertunda, sementara bencana membutuhkan tindakan cepat dan terkoordinasi untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan pendanaan dan sumber daya secara langsung memengaruhi efektivitas kebijakan penanggulangan bencana, khususnya pada tahap mitigasi dan rehabilitasi. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kesiapsiagaan bencana serta proses pemulihan pascabencana. Keterbatasan sarana pendukung, seperti sistem peringatan dini, pelatihan untuk masyarakat, dan infrastruktur pemulihan, menghambat upaya kesiapsiagaan bencana, sehingga mempersulit pemulihan pascabencana. Tanpa sarana tersebut, masyarakat dan instansi terkait tidak dapat merespons dengan cepat dan efektif terhadap ancaman bencana, serta proses pemulihan menjadi lebih lambat dan kurang optimal. Keterbatasan pendanaan juga menghalangi pelaksanaan langkah-langkah mitigasi yang dapat mencegah terjadinya bencana di masa mendatang. Tanpa alokasi dana yang cukup, upaya untuk mengurangi risiko bencana, seperti pembangunan infrastruktur yang tahan bencana atau peningkatan sistem peringatan dini, tidak dapat dilakukan secara efektif. Hal ini membuat masyarakat dan daerah lebih rentan terhadap bencana, serta memperburuk dampaknya ketika bencana tersebut terjadi. Dengan kata lain, kurangnya dana tidak hanya menghambat pencegahan, tetapi juga memperburuk kemampuan untuk meminimalkan kerugian dan dampak jangka panjang dari bencana. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang mitigasi dan kesiapsiagaan bencana menjadi salah satu tantangan yang ditemukan dalam penelitian ini. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk melakukan sosialisasi, informasi yang diterima oleh masyarakat masih belum memadai dan belum berhasil meningkatkan kesadaran serta kesiapan mereka secara signifikan dalam menghadapi bencana. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada usaha komunikasi dari pihak pemerintah, cara penyampaian dan cakupan informasi masih perlu diperbaiki agar lebih efektif dalam membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk

menghadapi bencana. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang mitigasi dan kesiapsiagaan bencana merupakan tantangan utama yang teridentifikasi dalam penelitian ini. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk melakukan sosialisasi terkait kebencanaan, informasi yang disampaikan belum cukup efektif atau menyeluruh untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian (Muhammad Fedryansyah, 2020) Di sisi lain, meskipun pemahaman masyarakat mengenai pencegahan bencana alam masih terbatas, nilai-nilai kekeluargaan seperti gotong royong dan saling membantu tetap dijunjung tinggi, terutama di kalangan masyarakat desa. Setelah terjadinya bencana, masyarakat menunjukkan kesediaannya untuk bersama-sama membersihkan sisa-sisa kerusakan akibat bencana, menunjukkan semangat solidaritas yang kuat dalam menghadapi masa pemulihan. Hal ini mencerminkan betapa meskipun ada keterbatasan dalam pengetahuan teknis tentang mitigasi, nilai-nilai sosial yang kuat dapat mendukung proses pemulihan pascabencana secara efektif. Penelitian ini menekankan perlunya kebijakan penanggulangan bencana yang dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi lingkungan, terutama terkait dengan peningkatan risiko bencana akibat perubahan iklim. Kebijakan yang lebih fleksibel dan didasarkan pada data yang akurat sangat dibutuhkan agar pemerintah dapat memberikan respons yang lebih cepat dan efektif terhadap bencana. Dengan pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan berbasis bukti, kapasitas pemerintah dan masyarakat dapat diperkuat untuk menghadapi ancaman bencana di masa depan dengan lebih baik.

## SIMPULAN

Implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia menghadapi tantangan utama berupa koordinasi yang lemah, birokrasi rumit, keterbatasan dana, dan rendahnya kesiapan masyarakat. Hambatan ini memperlambat respons dan mengurangi efektivitas mitigasi serta pemulihan pascabencana. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan, diperlukan perbaikan sistem koordinasi, penyederhanaan birokrasi, alokasi anggaran yang memadai, serta sosialisasi yang lebih efektif. Kebijakan berbasis bukti dan fleksibel juga penting untuk menghadapi risiko bencana akibat perubahan iklim. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan upaya ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Carmen-Valentina, R. Ä., CÄftÄflin-Octavian, M. Ä., Popescu, M.-L., & Burlacu, S. (2023). Sustainable Development in Public Administration: Research, Practice, and Education. European Journal of Sustainable Development, 12(4), 27.
- Fariza, A., & Handayani, B. L. (2022). Tindakan Struktural Mitigasi Bencana Pemerintah di Indonesia. Jurnal Analisa Sosiologi, 11(2), 288–305.
- Fauziah Zen (2014). Disaster Management in ASEAN. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Discussion Paper Series, 3(1), 45.
- Fedryansyah, M., Bektı, H., & Pancasilawan, R. (2020). Implementasi Perencanaan Mitigasi Bencana melalui Pendekatan Struktural Fungsional. Sosiohumaniora, 22(3), 375-381.
- Hearron, P. F., & Hildebrand, V. P. (2013). Guiding Young Children (9th ed.). Pearson
- Nisa, Farichatun. (2014). Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir, Putting Belitung dan Tanah Longsor di Kabupaten Jombang. JKMP .Vol. 2, No. 2, 103-220
- Nugroho, S. P. (2014). Kerjasama Sipil-Militer dalam Penanggulangan Bencana: Studi Kasus Tanggap Darurat Banjir Jakarta 2013, 2014, 2015. Jurnal Manajemen Bencana Indonesia, 1(1), 1-15.
- Nuriana, N., Rusyidi, B., & Fedryansyah, M. (2020). Mitigasi Bencana Berbasis Sensitive Gender. Share: Social Work Journal, 9(2), 179-190.
- Pangestu, S. D., & Fedryansyah, M. (2023). Implementasi Mitigasi Bencana Alam Berbasis Masyarakat melalui Kampung Siaga Bencana. Dakwatul Islam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 7(1), 113-125.
- Pezzica, C., & Cutini, V. (2021). Linking space syntax and cluster analysis to design and plan temporary housing neighborhoods: A taxonomy of sites in Norcia. Journal of Design for Resilience in Architecture and Planning, 2(Special Issue), 89–114. <https://doi.org/10.47818/DRArch.2021.v2si037>

- Rama, F., & Qadriina, H. I. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi: Konsep dan Metode Teknis Monitoring. *Information, Communications, and Disaster*, 1(1).
- Riady, Ibnu.Dkk. (2019). Analisis Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus PERDA Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011). *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*. Volume 1. Nomor 2.(hal.63-68)
- Ruchban, A. L., Darwis, R. S., & Wibowo, H. (2024). Elemen Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(1), 79–88.
- Sugiyantoro, R., & Purnomo, H. (2010). Manajemen Bencana: Respons dan Tindakan terhadap Bencana. MedPress.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun. (2007). tentang Penanggulangan Bencana.
- Wahana Visi Indonesia. (2021). Laporan Tahunan 2021
- Warto, A. T. (2002). Pengkajian Manajemen Penanggulangan Korban Bencana pada Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Alam dalam Era Otonomi Daerah (hlm. 6). Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Yusuf, S. P. M. (2015). Implementasi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (Studi Pengembangan Penanggulangan Bencana Desa Tangguh di Desa Boboh Kecamatan Menganti). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 12(1), 137–150.